

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Garner, Bryan (ed), 1999, *Black's Law Dictionary seventh Edition*, St. Paul Minn, New York,
- Anwar, Saiful, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan POM, 2012, *Profil BP POM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar)*,
- Bruggink, JJ.H. 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, alih Bahasa Arief Sidharta, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Campbell Black, Henry, 1990, *Black'S Law Dictionary*, West Publishing.
- Hamdan, M. , 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Sari, 2001, *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*,PT Pustaka Quantum, Jakarta.
- Harun, Rafi, 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi : Refleksi satu tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.

- K, Sukarno, 1992, *Dasar-Dasar Managemen*, Miswar, Jakarta.
- Kencana Syafii, Inu, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, PT. Bhineka Cipta, Jakarta.
- Kusnardi, Moh. dan Bintang saragih, 2000, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Lailam, Tanto, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Prudent Media, Yogyakarta.
- M. Hadjon, Phillipus, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des, Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 2004, *Discretionary Power dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)*, Paper disampaikan pada Seminar Nasional “Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi”, Semarang,
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Manan, Bagir 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
- Manullang, M, 1995, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marbun, S.F dan Mahfud Md, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Cetakan IV, Liberty, Yogyakarta.
- Marbun, S.F, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*,

LaksBang Pressindo, Yogyakarta.

Salindeho, Jhon, 1998, *Tata Laksana Dalam Manajemen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Siagian, S.P, 1970, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

Siagian, Sondang P. 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT.Bumi Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemantri, Sri, 1986, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD1945*, Alumni, Bandung.

Sujanto, "*Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*" Sinar Grafika, Jakarta 1989 ,

Yosa, 2010, *Pengawasan sebagai sarana penegekan hukum administrasi Negara*, Jurnal Depdagri , Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Kosmetik. No. HK. 00.05. 4. 1745, tanggal 5 Mei 2003

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.3870 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pemasukan Kosmetik. No. HK. 00.05. 4. 2995, Tanggal 10 Juni 2008

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Bahan Kosmetik. No. HK. 00.05. 42. 1018, Tanggal 25 Februari 2008.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang persyaratan teknis kosmetika No. HK. 03.1.23.12.10.12459, Tahun 2010

INTERNET

<http://wikipedia.org>; *internet*; *acesed* 15 September 2014.

<http://wikipedia.com>; *internet*; *acesed* 19 September 2014.

<http://pom.co.id>; *internet*; *acesed* 2 Agustus 2014